



## Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan

### *Community Empowerment Through Food Security Programs*

<sup>1</sup>Syara Agita; <sup>2</sup>Syara Purnamasari; <sup>3</sup>Regi Refian Garis; <sup>4</sup>Asep Nurdin Rosihan Anwar

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

Email: [syara\\_agita@student.unigal.ac.id](mailto:syara_agita@student.unigal.ac.id)

(Diterima: 24-07-2024; Ditelaah: 20-08-2024; Disetujui: 28-08-2024)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi masih kurangnya ketersediaan fasilitas penunjang pangan yang mendukung pada ketahanan pangan yang meliputi penyediaan teknologi pendukung untuk pengatur vitamin dan pakan untuk ternak dan juga alat untuk pengaturan iklim kelembaban dalam pengurusan buah naga. Sehingga Pemerintahan mengambil langkah dalam melaksanakan pemberdayaan untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan mencari solusi dengan pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan di Desa Janggala. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan menggunakan strategi penelitian deskriptif. Lalu mengumpulkan data melalui tinjauan literatur dan wawancara. Dalam hal ini, peneliti mengadopsi teori pemberdayaan masyarakat Mardikanto & Subianto (2017), yang menguraikan empat bidang fokus utama: bina manusia, usaha, lingkungan, dan kelembagaan. Hal ini dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan dari kegiatan pemberdayaan melalui bina manusia yaitu dengan memberikan edukasi, dukungan fasilitasi teknologi untuk kegiatan usaha dan juga dibentuknya kelompok ketahanan pangan desa. Dengan begitu dapat dinyatakan bahwa mengenai keberhasilan ketahanan pangan melalui upaya pemberdayaan masyarakat, meskipun belum secara maksimal terdapat dampak positif yang diterima masyarakat. Bina usaha dan lingkungan telah optimal, dengan terbentuknya BUMDes dan Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan rutin untuk pengembangan kapasitas individu, penyusunan peraturan desa yang spesifik, dan perbaikan struktur organisasi kelompok pengelola untuk meningkatkan efektivitas program.

**Kata kunci : Pemberdayaan, masyarakat, ketahanan pangan**

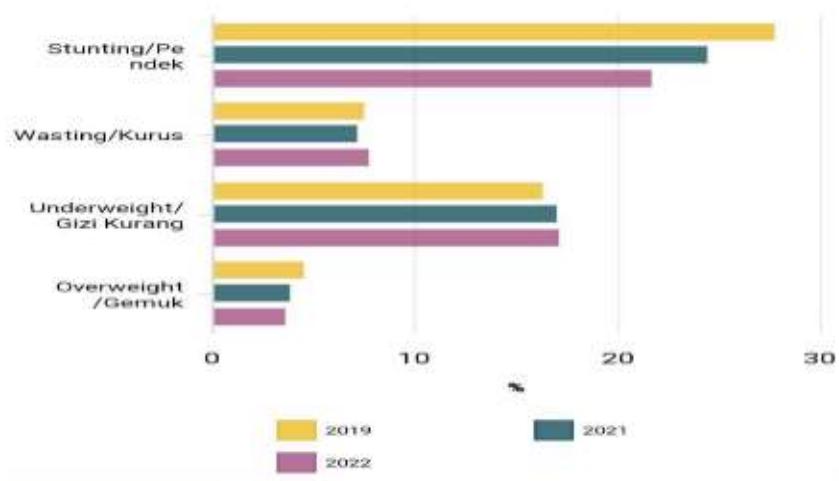
## ABSTRACT

This research is motivated by the insufficient availability of supporting food facilities that support food security, which includes the provision of supporting technology for vitamin regulators and animal feed, as well as tools for regulating humidity in dragon fruit management. Therefore, the government has taken steps to implement empowerment to solve the existing problems. This study aims to find solutions through community empowerment through the food security program in Janggala Village. The research method used is qualitative and uses a descriptive research strategy. Then, data was collected through literature review and interviews. In this case, the researcher adopted the theory of community empowerment by Mardikanto & Subianto (2017), which outlines four main focus areas: human development, business, environment, and institutions. This can be seen from the impact generated by empowerment activities through human development, namely by providing education, supporting technology facilitation for business activities, and also the formation of village food security groups. Thus, it can be stated that regarding the success of food security through community empowerment efforts, although not yet optimally, there are positive impacts received by the community. Business and environmental development have been optimal, with the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes). This study recommends the need for regular training for individual capacity development, the formulation of specific village regulations, and the improvement of the organizational structure of the management group to increase the effectiveness of the program.

**Keywords:** Empowerment, community, food security

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara berkembang, di negara berkembang permasalahan gizi terus muncul dan menjadi persoalan bagi negara. Permasalahan gizi ini masih menjadi permasalahan yang kompleks di Indonesia sebagaimana Hasil dari SSGI Kemenkes RI yaitu sebagai berikut:



**Gambar 1. Masalah Gizi yang Dialami Balita Indonesia Menurut SSGI (2019-2022)**

Sumber : Data Box, *Masalah Gizi yang Dialami Balita Indonesia Menurut SSGI (2019-2022)*

Berdasarkan pada data di atas dapat dijelaskan bahwa terkait dengan masalah gizi yang dialami balita di Indonesia yaitu karena tingkat kemiskinan dan juga kemampuan dalam penyedian makanan pokok dan sehat sesuai anjuran kesehatan masih terbatas.

Syara Agita; Syara Purnamasari; Regi Refian Garis; Asep Nurdin Rosihan Anwar (2025).  
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan

Untuk balita kasus stunting, kurus dan gizi kurang terjadi karena faktor keterbatasan dalam menerima gizi makanan dan asupan vitamin karena keterbatasan orang tua untuk menyediakan kebutuhan gizi tersebut.

Desa Janggala yakni salah satu desa di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, berdasarkan hasil observasi peneliti Desa Janggala mempunyai permasalahan gizi pada masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah desa harus melaksanakan program ketahanan pangan yang dibarengi dengan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa Janggala telah menetapkan program ketahanan pangan yang memberdayakan masyarakat. Program tersebut antara lain beternak kambing etawa dan buah naga yang memberdayakan kelompok peternak.

Adapun keberhasilan program yang dilaksanakan karena sebagian besar masyarakat memiliki basic peternakan dan didukung oleh kondisi alam untuk penyediaan pakan ternak tersebut. Begitupun dengan program penanaman buah naga dapat maksimal karena faktor iklim dan juga kondisi tanah yang mendukungnya.

Program pemberdayaan masyarakat ini juga pemerintah Desa Janggala lakukan sebagai implementasi dalam SDGS Desa poin 2 "Tanpa Kelaparan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan". Di Desa Janggala capaian yang tercantum dalam capaian SDGs Desa poin ke 2 yaitu 33.33% maka program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan di jadikan program prioritas sebagai perhatian serta penanganan pemerintah desa terhadap permasalahan gizi di Desa Janggala.

Fenomena masalah yang dihadapi yaitu belum terpenuhinya fasilitas penunjang pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan seperti halnya pendamping kesehatan untuk pengelolaan ternak kambing etawa hal ini berakibat pada ternak yang tidak berkembang sebagaimana mestinya. Contoh adanya kambing etawa yang dalam memproduksi susu tidak rutin hal ini dapat di buktikan dengan adanya penukaran ternak yang tidak berkembang atau lambat dalam menghasilkan susu pada bulan September 2023.

Belum adanya strategi dari pemerintah terhadap pemasaran hasil dari program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan yaitu susu kambing etawa, sehingga hasil produksi susu terjadi penumpukan dalam freezer yang telah di sediakan. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya masyarakat khususnya Desa Janggala yang bahkan tidak mengetahui adanya susu kambing etawa ini, selain dari masyarakat yang telah menjadi sasaran bagi terwujudnya program ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut menggunakan judul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis" berdasarkan pada acuan indeks teori pemberdayaan masyarakat yang disampaikan Mardikanto (2017), yang menjelaskan bahwa terdapat empat bidang fokus utama pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu bina manusia, usaha, lingkungan, dan kelembagaan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka indikator permasalahan tersebut jika di biarkan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga tujuan penelitian yaitu untuk mencari suatu solusi melalui Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Metode ini memberikan gambaran fenomena yang lebih lengkap karena peneliti mampu mendeskripsikan temuan lapangan secara mendalam berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur terhadap 6 informan yang ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Untuk observasi secara partisipatif, serta data dokumen dari laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Janggala. Teknik analisis data secara naratif, dan dalam menguji keabsahan melalui triangulasi sumber. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, dengan waktu penelitian selama enam bulan yaitu Maret-Agustus 2024.

## C. HASIL DAN DISKUSI (RESULT AND DISCUSSION)

### Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis

Dalam mencari solusi terkait dengan permasalahan ketanganan pangan yang terjadi di Desa Janggala, maka dalam hal ini melalui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mampu untuk mendorong dan menjadi solusi permasalahan yang terjadi. Dengan begitu untuk mengukur pada Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Ketahanan Pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog, penulis sajikan hasil penelitian yang dilandasi oleh dimensi dari indikator upaya pokok pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebianto (2017:114-117):

#### 1. Bina Manusia

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, definisi bina manusia lebih ditekankan kepada upaya meningkatkan kapasitas dan potensi manusia melalui pembangunan kapasitas (*capacity building*). Bina manusia dalam pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai serangkaian upaya terencana dan sistematis untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan individu maupun kelompok masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia dimulai dari adanya tahapan identifikasi potensi yang tersedia pada sumber daya manusia yang menjadi sasaran program pemberdayaan yaitu masyarakat Desa Jenggala meliputi potensi usaha, potensi ekonomi bidang pertanian, bidang peternakan dan juga bidang perikanan. Jika dilihat dari kondisi geografisnya Desa Jenggala merupakan wilayah yang berpotensi pada sektor pertanian dan perkebunan sehingga sebagian besar masyarakatnya mata pencaharian utama sebagai petani.

Sebelumnya melalui Badan Usaha Milik Desa telah dilaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok petani jaya dengan fokus utama yaitu penanaman padi hybrida namun tidak berjalan optimal karena keterbatasan dukungan dan motivasi yang terbangun pada petani karena kondisi alam yang cukup panas dan memasuki pada musim kemarau panjang. Pada hasil musyawarah bersama kini Pemerintah beralih untuk melaksanakan pemberdayaan dengan fokus pemberdayaan peternakan kambing etawa dan juga penanaman buah naga. Hal ini didukung oleh kondisi yang lebih memudahkan dalam pencarian pakan untuk ternak karena dekat dengan wilayah gunung atau bukit.

Syara Agita; Syara Purnamasari; Regi Refian Garis; Asep Nurdin Rosihan Anwar (2025).

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan

Adapun motivasi lain yang menjadikan kebutuhan terhadap pemberdayaan yaitu karena adanya keinginan untuk keluar dari zona keterbatasan masyarakat untuk berdaya. Dalam hal ini, meskipun masyarakat sudah lama melaksanakan kegiatan ternaknya, namun belum mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu melalui pelaksanaan bina manusia melalui pemberdayaan masyarakat dengan peternakan kambing etawa dan buah naga karena selain pengurusan yang mudah, hasil dari susu kambing eta ini sangat banyak manfaatnya dan memiliki daya jual cukup mahal. Dan sebelumnya pernah ada peternak kambing etawa di Desa Janggala sehingga menjadi motivasi yang menjadikan pemberdayaan masyarakat ini terlaksana.

Pada awal pelaksanaan pemberdayaan jumlah partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan yang dilaksanakan hanya Ketua RT dan juga peternak kambing saja, namun karena terdapat potensi keberhasilan dan motivasi ingin adanya perubahan ke arah yang lebih baik dan mengubah perekonomian masyarakat, maka beberapa masyarakat lainnya yang memiliki potensi peternakan dan juga perkebunan bergabung untuk diberdayakan.

Pada potensi usaha ternak kambing menjadi salah satu potensi yang sedang diberdayakan dimana pada awalnya peternak hanya melakukan pengurusan dan menjualnya. Namun hasil penjualannya belum mampu memberikan keuntungan karena ketentuan pasar dengan kualitas tententu, yaitu usia dan juga kondisi hewan harus sehat dan besar. Sebelumnya karena kepengurusan ternak kurang maksimal dimana tidak ada kontrol terhadap pakan dan juga tidak diberikan vitamin karena keterbatasan biaya menjadikan kondisi ternak kurang maksimal.

Dengan begitu pemerintah desa besama BUMDes bersinergi dalam membuat suatu program untuk menangani permasalahan yang terjadi yaitu dengan dilaksanakan pemberdayaan melalui pelatihan, penyuluhan, dan bantuan kebutuhan vitamin. Masyarakat yang menerima pemberdayaan menyadari bahwa dampak positif yang diterima berpengaruh pada tingkat ekonomi, hanya saja masalah lainnya yang dihadapi yaitu dalam kemampuan melihat peluang serta keterbatasan dalam penyediaan vitamin yang cukup mahal menjadikan peternak harus memutar otak untuk menyediakan kebutuhan selain pada pakan yang berkualitas.

Upaya bina manusia dalam pemberdayaan masyarakat dimulai dengan membantu mereka memahami potensi diri dan lingkungan sekitarnya. Melalui pemetaan potensi, masyarakat dibantu untuk mengenali SWOT yang ada di wilayah mereka. Pemahaman ini penting agar mereka dapat mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang sesungguhnya untuk kemudian dicari solusi yang tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan pada bina manusia terdapat beberapa indikator yang diberdayakan yaitu:

**a. Pengembangan kapasitas entitas kelembagaan**

Komitmen dalam mengembangkan kapasitas entitas kelembagaan ini dapat diwujudkan melalui berbagai upaya, seperti pelatihan, pendampingan, penyediaan sumber daya yang memadai, serta pembentukan struktur organisasi yang jelas dan efektif. Pelatihan dan pendampingan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi anggota entitas kelembagaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil observasi, program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas

individu, tetapi juga dirancang untuk memperkuat mutu entitas dan kelembagaan di desa. Hal ini terlihat dari beberapa upaya yang dilakukan, seperti:

Pelatihan dan pendampingan: Kelompok pengelola program mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas mereka dalam mengelola program dan mengembangkan usaha. Kolaborasi: Program ini mendorong kolaborasi antara berbagai pihak di desa, seperti pemerintah desa, kelompok tani, Kolaborasi ini membantu meningkatkan sinergi dan efektivitas program. Fasilitasi tenaga ahli: Tenaga ahli di bidang, peternakan, dan pengelolaan program difasilitasi untuk memberikan bimbingan dan pendampingan kepada kelompok pengelola program. Pembekalan: Kelompok pengelola program mendapatkan pembekalan materi dan alat-alat yang diperlukan untuk menjalankan program. Pemanfaatan media pembelajaran: Media pembelajaran, media sosial digunakan untuk meningkatkan pemahaman kelompok pengelola program.

#### b. Pengembangan kapasitas sistem

Upaya pengembangan kapasitas sistem pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di desa Janggala telah dilakukan dengan optimal. Hal ini terlihat dari adanya pelatihan dan edukasi yang diberikan kepada kelompok pengelola. Pelatihan dan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya pangan secara berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, kelompok pengelola program diajarkan tentang tatacara pengelolaan program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan baik di bidang peternakan kambing etawa maupun perkebunan buah naga, kelompok pengelola juga diajarkan tentang strategi pemasaran produk pertanian. Selain pelatihan dan edukasi, upaya pengembangan kapasitas sistem juga dilakukan melalui penyediaan fasilitas pendukung, pembinaan, dan upaya memaksimalkan kinerja pengelolaan. Pemerintah desa Janggala telah menyediakan fasilitas pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dalam aspek bina manusia terkait dengan pengembangan kapasitas individu yang mana rencana pelatihan jangka panjang, pendek dan menengah belum dilakukan secara rutin. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Mulyana, Pawan, & Maabuat (2022) bahwa pada aspek bina manusia, perlu untuk memperhatikan adanya dukungan keberlanjutan pemberdayaan khususnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan upaya pengembangan kapasitas entitas kelembagaan telah optimal karena telah dilakukannya pelatihan, pendampingan, dan strategi pengembangan kapasitas dengan memanfaatkan media pembelajaran. Selanjutnya untuk upaya pengembangan kapasitas sistem juga telah dilakukan secara optimal melalui pelatihan, edukasi, penyediaan fasilitas pendukung, pelatihan, dan upaya memaksimalkan kinerja pengelolaan. Kelompok pengelola program menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memaksimalkan kinerja program pengelolaan.

## 2. Bina Usaha

Strategi pemberdayaan masyarakat yang berupaya mengentaskan kemiskinan, mengurangi disparitas pengeluaran, dan meningkatkan pendapatan ekonomi mencakup pertumbuhan bina usaha. Meningkatkan kemahiran di berbagai bidang seperti teknologi,

pembiayaan, pasar, dan informasi pembangunan; mengelola usaha skala kecil; dan peningkatan keterampilan bisnis merupakan tujuan dari program pemberdayaan ini. Masyarakat diberikan alat yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kehidupan mereka sendiri, dalam jangka panjang, melalui pertumbuhan bisnis. SDM, SDA, lingkungan hidup, dan pengembangan usaha merupakan komponen strategi yang lebih besar untuk memberdayakan masyarakat melalui bisnis.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan pada bina usaha terdapat beberapa indikator yang diberdayakan yaitu:

**a. Terdapatnya Pembentukan Badan Usaha**

Berdasarkan hasil penelitian dalam aspek bina usaha, program telah mencapai hasil optimal dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola hasil program, serta kelompok pengelola yang aktif memasarkan hasil produk secara langsung dan memanfaatkan media sosial untuk promosi. Sarana dan prasarana utama yang telah disediakan meliputi kandang yang cukup baik, tempat pengelolaan, sumur bor, dan tenaga kerja yang kompeten. Selain itu, fasilitas pendukung seperti sekretariat program yang luas, dengan kamar, kamar mandi, teras, penerangan, dan infrastruktur pendukung seperti jalan akses juga telah tersedia.

**b. Terdapatnya pengembangan sarana dan prasarana pendukung**

Program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan di Desa Janggala telah menunjukkan kemajuan yang optimal dalam pengembangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana utama yang telah disediakan meliputi kandang yang cukup baik, tempat pengelolaan, sumur bor, dan tenaga kerja yang kompeten. Selain itu, fasilitas pendukung seperti sekretariat program yang luas, dengan kamar, kamar mandi, teras, penerangan, dan infrastruktur pendukung seperti jalan akses juga telah tersedia. Pengembangan sarana dan prasarana ini sangat penting dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan bina usaha bukan hanya dilihat dari faktor sumber daya manusia yang mendukungnya melainkan ketersediaan fasilitas pendukung seperti adanya teknologi yaitu alat semprot air untuk membersihkan, alat pengatur vitamin dan disinfektan. Namun, hal tersebut belum mampu untuk disediakan disamping keterbatasan modal masalah lainnya juga terkait dengan keberlanjutan usaha untuk perbaikan alat belum mampu untuk dimaksimalkan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Prihatini, Elungan, & Rifai, (2022) bahwa pemerintah harus memperhatikan pada pemberian sarana dan prasarana harus lebih tepat sasaran agar kelompok nelayan selain merasa terbantu dengan bantuan yang diberikan juga apabila bantuan tepat sasaran bantuan tersebut akan sangat bermanfaat

Pelaksanaan pemasaran dilakukan pelatihan manajemen pemasaran secara online yang meliputi proses menawarkan kepada konsumen, respon ketika ada konsumen tertarik dan juga adu harga ketika proses penawaran. Pelatihan manajemen pemasaran ini dilakukan untuk membangun image dan ketertarikan konsumen terhadap produk yang ditawarkan.

Pada dasarnya masyarakat yang sudah diajarkan belum mampu untuk menerapkannya secara langsung dan perlu untuk beradaptasi kembali pada proses

penjualan dengan cara baru. Oleh karena itu, melalui pembentukan BUMDes diupayakan mampu untuk membantu dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.

Masyarakat yang menerima pemberdayaan menyadari bahwa dampak positif yang diterima berpengaruh pada tingkat pengetahuan dalam kepengurusan ternak yang tepat, serta hal lainnya yaitu adanya relasi dan dukungan mitra usaha menjadi salah satu indikator yang mendorong pada adanya keberlanjutan usaha yang sedang dilaksanakan sebagai salah satu potensi usaha yang sedang diberdayakan.

### 3. Bina Lingkungan

Salah satu komponen program pemberdayaan masyarakat adalah bina lingkungan. Pembangunan lingkungan hidup didefinisikan sebagai "tindakan yang diambil untuk menjamin berlanjutnya perlindungan, peningkatan, dan peningkatan lingkungan alam suatu wilayah atau masyarakat" oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018). Dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Sebuah rencana pembangunan lingkungan hidup akan mencakup sejumlah langkah untuk melakukan hal-hal berikut: meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya pelestarian lingkungan hidup; mengajari mereka cara mengelola lingkungan mereka sendiri secara berkelanjutan; membuat program untuk membantu upaya konservasi; melibatkan masyarakat dalam rencana ini; dan, tentu saja, membuat kondisi kehidupan setiap orang menjadi lebih baik.

Dalam hal perbaikan ekologi, temuan studi ini menunjukkan bahwa inisiatif pemberdayaan masyarakat Desa Janggala melalui program ketahanan pangan sukses besar. Upaya tulus pemerintah, organisasi pengelola, dan masyarakat untuk melindungi lingkungan telah membawa hasil terbaik. Komponen penting dari pencapaian ini adalah dedikasi yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Mardikanto (2017) tentang tanggung jawab lingkungan, yang mencakup kewajiban untuk memenuhi standar yang berkaitan dengan konservasi, pemeliharaan, dan perbaikan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya.

Selain itu, terdapat aspek sosial budaya yang harus diperhatikan terkait dengan kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan sehingga memerlukan adanya pelestarian lingkungan. Dalam lingkungan sosial dan budaya terntunya terdapat pola interaksi yang saling berkesinambungan termasuk juga dari teknologi yang dipergunakan. Dari kegiatan usaha peternakan yang dilakukan oleh masyarakat perlu untuk memperhatikan pada pembuangan limbah kotoran hewannya jangan sampai memberikan dampak atau pengaruh pada lingkungan sosial masyarakat karena bau dan juga pengaruhnya terhadap air cukup mencemarkan. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan juga pengawasan untuk pembuangan limbah kotoran hewan Kambing etawa karena kurang cocok untuk pembuatan menjadi pupuk.

Selain itu, optimalisasi penyediaan kewajiban tersebut juga harus didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat. Masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai subjek yang diberdayakan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam melaksanakan kegiatan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Nurgiarta, & Rosdiana, (2019) bahwa dengan keterlibatan langsung masyarakat,

diharapkan akan tumbuh rasa kepemilikan dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan di wilayah mereka. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan dalam jangka panjang.

#### **4. Bina kelembagaan**

Bina kelembagaan merupakan salah satu strategi penting dalam program pemberdayaan Masyarakat, yang mana bina kelembagaan ini merupakan proses pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bersama. Bina kelembagaan ini juga merupakan proses yang berkelanjutan maka dari itu membutuhkan komitmen dari berbagai pihak.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan pada bina kelembagaan terdapat beberapa indikator yang diberdayakan yaitu:

##### **a. Terdapatnya komponen person**

Berdasarkan hasil penelitian dalam aspek bina kelembagaan pada program ini telah optimal dalam aspek komponen person dimana pemerintah desa telah melakukan seleksi dan menempatkan personel yang kompeten dan berpengalaman, serta memberikan pelatihan dan pembinaan kepada kelompok pengelola program. Membangun dan memperkuat kapasitas lembaga atau organisasi yang menjalankan program sangatlah penting, dan kegiatan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mengutamakan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan program. Secara keseluruhan, pernyataan ini mengindikasikan bahwa dalam hal pengembangan personel dan kapasitas kelembagaan, program tersebut telah dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa.

##### **b. Terdapatnya komponen kepentingan**

Pada komponen kepentingan program ini melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam, seperti pengembangan kelembagaan, penyediaan infrastruktur pendukung, fasilitas, pelatihan, serta dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa telah memfasilitasi kepentingan program dengan menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan. Tindakan ini menunjukkan adanya upaya konkret untuk memfasilitasi dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang terlibat dalam program. Pendekatan yang komprehensif ini mencerminkan pemahaman bahwa keberhasilan program bergantung pada sinergi antara berbagai elemen, mulai dari pengembangan kapasitas kelembagaan hingga dukungan fisik dan non-fisik dari berbagai pihak. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada satu aspek saja, tetapi berusaha untuk menciptakan ekosistem yang mendukung secara menyeluruh untuk mencapai tujuannya.

##### **c. Terdapatnya komponen aturan**

Namun masih belum optimal dalam aspek komponen aturan karena adanya kekurangan dalam aspek regulasi pada tingkat desa terkait program yang sedang dibahas. Meskipun ada upaya positif dalam pengelolaan sumber daya manusia, program ini masih menghadapi tantangan dalam hal kerangka hukum lokalnya. Secara spesifik, belum ada peraturan desa yang dirancang khusus untuk mengatur program ini. Sebagai gantinya,

program tersebut masih mengandalkan regulasi tingkat nasional, yaitu Perpres No. 104 Tahun 2021 tentang RAPBN Tahun Anggaran 2022. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara implementasi program di tingkat desa dengan kerangka hukum yang lebih spesifik dan kontekstual. Ketiadaan peraturan desa yang spesifik dapat berpotensi menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan program, terutama dalam hal penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan lokal yang mungkin tidak sepenuhnya tercakup dalam peraturan tingkat nasional.

Selanjutnya dalam komponen struktur organisasi adanya perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terlibat, dan kedua, ketidakjelasan dalam struktur organisasi kelompok pengelola. Dalam hal ini adanya ketidakjelasan karena berdasarkan penjelasan sebelumnya yaitu belum adanya peraturan desa yang mengatur dengan pasti untuk struktur pengelola sehingga dalam hal ini terdapat tumpangtindih tugas dan peranannya yang tidak sesuai dengan kesepakatan berdasarkan jabatannya. Adapun untuk struktur organisasi kelompok pengelola ketahanan pangan terdiri dari Ketua Kelompok, Bendahara Kelompok, dan 3 orang anggota.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, kelompok pengelola ketahanan pangan Desa Jenggala sering melaksanakan musyawarah dan rapat yang pada awal pembentukannya dilaksanakan setiap minggu. Namun setelah masa pembentukan kegiatan pertemuan menjadi terbatas dan bahkan cukup jarang dilaksanakan. Hal ini juga terjadi karena sering adanya perbedaan pendapat yang terjadi dalam internal kelompok, meskipun menjadi hal wajar karena memiliki pemikiran yang berbeda namun yang menjadi permasalahan yaitu masih adanya egosentrism dan sikap memaksakan pendapatnya untuk dilaksanakan menjadi salah satu penyebab adanya konflik yang terjadi.

Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun program mungkin memiliki tujuan yang baik, pelaksanaannya terhambat oleh ketidaksesuaian dalam pemahaman dan pengaturan organisasi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Suryani, Saleh, & Akhmad (2023) bahwa Perbedaan pendapat bisa jadi mencerminkan adanya berbagai perspektif atau kepentingan yang belum terselesaikan, sementara ketidakjelasan struktur organisasi dapat mengakibatkan kebingungan dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan alur komunikasi. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas dan efisiensi pengelolaan program, khususnya dalam konteks peternakan kambing etawa yang mungkin memerlukan penanganan dan keahlian khusus.

### **Hasil Diskusi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis**

Pada Bina Manusia pemerintah Desa Janggala harus segera merealisasikan pelatihan rutin yang telah di rencanakan dengan menyusun jadwal pelatihan rutin jangka panjang, pendek, dan menengah serta mengalokasikan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengoptimalkan pengembangan kapasitas individu dalam program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi kebutuhan pelatihan, menyusun jadwal pelatihan yang realistik, mengalokasikan anggaran yang memadai, menjalin kemitraan dengan lembaga pelatihan, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pelatihan.

Pada Bina Usaha perlu adanya pengoptimalan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola dan memasarkan hasil produk program, serta memanfaatkan media sosial dan strategi pemasaran yang efektif untuk memperluas jangkauan pemasaran. Pengelola BUMDes dapat memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pemasaran.. Pemasaran produk BUMDes menjadi sangat penting, terutama dalam era digital saat ini, di mana berbagai model pemasaran dapat dilakukan, termasuk pemasaran berbasis digital atau internet

Pada Bina Lingkungan pemerintah harus memastikan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan dalam jangka panjang, penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. mempertahankan dan bahkan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program-program serupa di masa depan. Ini dapat dilakukan dengan terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan memberikan pelatihan serta dukungan yang diperlukan. Ini akan membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang baru, serta memungkinkan penyesuaian dan perbaikan program sesuai dengan kebutuhan.

Pada Bina Kelembagaan Pemerintah desa perlu menyusun peraturan desa (Perdes) yang mengatur secara khusus tentang program Pemberdayaan Masyarakat melalui Ketahanan Pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. Peraturan desa (perdes) ini nantinya memberikan landasan hukum yang jelas dan mengikat untuk pelaksanaan program, sehingga dapat meminimalkan batasan hukum. Pemerintah Desa Janggala juga perlu melakukan evaluasi dan perbaikan struktur organisasi kelompok pengelola agar lebih jelas dan efektif. Memperbaiki Struktur Organisasi Kelompok Pengelola bisa dilakukan dengan mengadakan rapat atau musyawarah dengan melibatkan seluruh anggota kelompok pengelola untuk berdiskusi dan menyepakati struktur organisasi yang jelas kemudian menetapkan tugas, tanggung jawab, dan mengizinkan masing-masing pihak dalam struktur organisasi secara rinci sampai dengan membentuk tim khusus untuk mengelola peternakan kambing etawa dengan struktur yang jelas dan pembagian tugas yang terkoordinasi.

#### D. KESIMPULAN

Program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog menunjukkan hasil positif namun masih memiliki ruang perbaikan. Dalam hal ini bina manusia telah optimal dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dan sistem, tetapi perlu peningkatan dalam pelatihan individu. Selain adanya pelatihan individu pelaksanaan bina manusia juga dapat dilaksanakan yaitu terkait dengan mitra kerja atau mitra usaha yang mampu untuk mendorong pada perluasan relasi serta adanya sharing moment terkait dengan keberlanjutan usaha. Bina usaha berhasil dengan terbentuknya BUMDes dan tersedianya sarana prasarana memadai. Namun aspek lainnya juga penting untuk dilaksanakan yaitu terkait dengan peningkatan kemampuan secara mandiri dalam melaksanakan pemeliharaan perbaikan pada sarana dan prasarana. Bina lingkungan mencapai hasil optimal dengan komitmen kuat dari berbagai pihak, namun perlu untuk dilaksanakan pembinaan pada pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan. Bina kelembagaan berhasil dalam komponen orang dan kepentingan, namun masih perlu perbaikan dalam aspek aturan dan struktur organisasi. Secara keseluruhan,

program ini berdampak positif pada pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan, meski masih memerlukan penyempurnaan untuk efektivitas yang lebih optimal. Selain itu, sebaiknya untuk lebih mengoptimalkan kelembagaan Pemerintah Desa perlu untuk memperhatikan legalitas lembaga dengan mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anita, D. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Ilmiah*
- Aziz, N., & Anjani, M. (2024). The Effect of Office Equipment on Employee Performance at the Kertajaya Village Office Cigugur District Pangandaran Regency. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, 14(1), 1-10.
- Bili, SR, & Ra'is, DU (2019). Dampak dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6 (3).
- Dandi Novika, Regi Refian Garis, & Arie Budiawan. (2023). GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA MANGKUBUMI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(3), 129-142. Diambil dari <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov/article/view/12>
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135
- Fika Febriani. (2023). SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY: REVIEW OF GOVERNMENT POLICY IN MAINTAINING THE ENVIRONMENT. *Kybernetology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 1(1), 26-36. Retrieved from <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernetology/article/view/39>
- Habib, MAF (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. Ar Rehla: *Jurnal Pariwisata Islami, Makanan Halal, Traveling Islami, dan Ekonomi Kreatif*, 1 (2), 82-110.
- Herdiana, A., Darwanto, D. H., & Mulyo, J. H. (2014). Ketahanan pangan rumah tangga di Kabupaten Ciamis. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 11(1), 21-3
- Hermawan, E., Pebriyani, D., Julianty, D. N., Safitri, F., & Laksono, G. T. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 191-198.
- Ipan Nurhidayat. (2023). Ipan Nurhidayat. (2023). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI DI DESA KERTAJAYA KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 10-23. Diambil dari <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov/article/view/>
- Ismi Arifiana Rahmandari, Sutardi, Rido Ashabul Kahfi, Lalu Ahmad Rahmad, I Made Putra Suryantara, & MS Hambali. (2024). ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA GUNA MENINGKATKAN PENGHASILAN ASLI DESA DI DESA DASAN GERIA KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021. *Kybernetology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2(1). Retrieved from <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernetology/article/view/90>

- Mulyana, M., Pawan, A. P., & Maabuat, E. E. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Tondok Bakaru Di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. J-3P (*Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*), 16-32.
- Nurgiarta, D. A., & Rosdiana, W. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. *Publika*, 7(3).
- Permata, F. S., & Sirat, M. M. P. (2024). Transfer teknologi kolam ikan bioflok melalui pendekatan tripartit: akademisi, praktisi budidaya ikan dan kelompok masyarakat. *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, 3(1), 40-49
- Prihatini, J., Elungan, P. C., & Rifai, M. (2022). Pemberdayaan Kelompok Nelayan Melalui Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Desa Dalum Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. J-3P (*Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*), 20-44.
- Rosmedi, & Riza, M. (2019). Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 3(2), 1-13
- Saepudin, E. (2022). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 11(3), 227-23
- Suriyani, A., Saleh, S., & Akhmad, A. (2023). Program Inovasi Bina Manusia Dalam Pemberdayaan Kelompok Penenun Di Sentra Tenun Ikat Jata Kapa Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 288-297.
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto (2017) Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif kebijakan publik